



**LAPORAN
BENCHMARKING TENTANG PENGAWASAN
INSPEKTORAT UTAMA SETJEN DPR RI
KE PERWAKILAN BPKP PROPINSI JAWA TIMUR,
INSPEKTORAT PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR DAN
SEKRETARIS DPRD KOTA SURABAYA**



JAKARTA, 3 - 5 AGUSTUS 2016

DAFTAR ISI

	hal
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan.....	2
C. Pelaksana Kegiatan	2
D. Waktu Pelaksanaan	2
II. HASIL KUNJUNGAN BENCHMARKING.....	3
1. Pertemuan dengan Inspektorat Propinsi Jawa Timur	3
2. Pertemuan dengan Sekretaris Dewan DPRD	
3. Kota Surabaya	4
4. Pertemuan dengan BPKP Perwakilan Jawa Timur	5

LAPORAN

BENCHMARKING TENTANG PENGAWASAN INSPEKTORAT UTAMA SETJEN DPR RI KE PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TIMUR, INSPEKTORAT PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DAN SEKRETARIAT DPRD KOTA SURABAYA TANGGAL 3 S.D 5 AGUSTUS 2016

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka reformasi birokrasi, maka komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme pada aspek pelaksanaan tugas umum pemerintahan serta pembangunan semakin dioptimalisasikan. Hal ini sesuai dengan amanat TAP Majelis Pemusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN dan sudah menjadi agenda yang harus dilaksanakan oleh semua Kementerian/Lembaga Pemerintahan. Hal tersebut merupakan tantangan berat bagi tugas aparatur pengawasan intern pemerintah dimasa depan yang harus dihadapi dengan komitmen dan profesionalisme tinggi. Sistem Pengawasan adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI) melalui peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 06 tahun 2015 telah memiliki struktur organisasi yang baru yaitu Inspektorat Utama setingkat Eselon I. maka dari itu untuk lebih mempertajam pengetahuan terkait mekanisme pelaksanaan pengawasan yang baik serta sistematis maka perlu melakukan beberapa tinjauan lapangan lebih lanjut, salah satunya dilakukan benchmarking ke Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan Sekwan DPRD Kota Surabaya. Daerah ini dipilih karena Ibukota Provinsi Jawa Timur adalah Kota Surabaya yang merupakan kota terbesar no.2 di Indonesia dan

Salah Satu daerah yang telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penyelenggaraan Pengawasan dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Surabaya dan Beberapa Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kota Surabaya.

B. Tujuan

Tujuan melakukan kunjungan Benchmarking ke Inspektorat Provinsi Jawa Timur, Sekretaris DPRD Kota Surabaya dan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur adalah untuk menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman tentang implementasi pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan Sekwan DPRD di Kota Surabaya.

C. Pelaksana Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari Inspektur II, para Auditor dan Pegawai Setjen DPR RI, yaitu:

No	NAMA	JABATAN
1.	Ign. Bambang Rudy Anto, S.H., M.H.	Inspektur II
2.	Nurhariyani, S.E, M.M.	Auditor
3.	Enden Adipati Koma, S.E, M.A.P	Auditor
4.	Beny Rahbandiyosa Sabri, S.E.	Auditor
5.	Denny Ramadon, S.E.	Auditor
6.	Margaretha Susanti, S.E.	Auditor
7.	Taryono, S.A.P.	Auditor
8.	Eko Praptomo, S.Sos	JFU TU Ittama
9.	Reti Ardiyanti, S.E.	JFU TU Ittama

D. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Kunjungan Benchmarking Setjen DPR RI ke Inspektorat Provinsi Jawa Timur, Sekwan DPRD Kota Surabaya dan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, adalah tanggal 3 s.d 5 Agustus 2016.

II. HASIL KUNJUNGAN BENCHMARKING



Kunjungan Benchmarking ke Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur difokuskan pada 3 (Tiga) Instansi yaitu; Inspektorat Provinsi Jawa Timur Sekretariat DPRD Kota Surabaya dan Perwakilan BPKP Jawa Timur. Adapun kunjungan Benchmarking yang dapat

dilaporkan adalah sebagai berikut:

1. Pertemuan dengan Inspektorat Provinsi Jawa Timur



Pertemuan dilaksanakan pada Rabu, 3 Agustus 2016 pukul 08.00 di terima oleh Sekretaris Inspektorat Provinsi Jawa Timur, Inspektur Pembantu dan jajarannya, Informasi yang didapatkan pada pertemuan tersebut, yaitu;

- a. Inspektorat Provinsi Jawa Timur memiliki 55 Orang Auditor yang menangani 400 objek satuan kerja dan saat ini, masih membutuhkan tenaga Auditor.
- b. Secara umum pelaksanaan kegiatan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur tidak hanya berpedoman pada PKPT namun juga pada hal-hal yang penting (*urgent*) saja.
- c. Untuk meningkatkan kemampuan Auditor instansi ini melakukan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) yaitu dengan langsung turun ke lapangan jika terdapat kasus atau kendala dilapangan baru dilakukan pembahasan.
- d. Selain auditor yang memiliki tugas dan fungsi pemeriksaan keuangan atau audit keuangan, juga ada bagian fungsional lain yakni P2PD (pejabat pemeriksa urusan pemerintah daerah) yang melakukan audit di luar audit keuangan. Sedangkan sekretariat memiliki 3 kegiatan yakni untuk evaluasi kinerja APIP, Pemeriksaan SPJ serta evaluasi tindak lanjut pemeriksaan.
- e. Inspektorat Provinsi Jawa Timur mendapat 4 tahun predikat WTP, pada tahun 2014 turun ke predikat WDP kemudian 2015 mendapat kembali

predikat WTP, bahkan di tahun 2015 juga mendapatkan penilaian IACM level 1 dari BPKP.

- f. Dalam proses pemeriksaan maupun penentuan objek pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atau aparat hukum lain, tidak langsung melakukan pemeriksaan ke SKPD namun harus melalui Inspektorat dan Jika diperlukan pemeriksaan yang langsung ke SKPD terkait, dilakukan pendampingan dari pihak Inspektorat.
- g. Inspektorat Provinsi Jawa Timur berprinsip melakukan tugas dan fungsi pengawasan sebagai konsultan, assurance dan security assurance.
- h. Apabila tindak lanjut temuan BPK maupun temuan dari Inspektorat hingga selesai sampai tuntas, untuk itu Inspektorat Provinsi Jawa Timur mengeluarkan sertifikat tuntas untuk masing-masing obyek temuan yang terselesaikan

2. Pertemuan dengan Sekretaris Dewan DPRD kota Surabaya



Pertemuan dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 3 Agustus 2016, pukul 11.40 dan diterima oleh Sekretaris DPRD Kota Surabaya Bapak H. Hadisiswanto Anwar, SH, M.Si. Informasi yang didapatkan pada pertemuan tersebut, yaitu;

- a. Dalam hal anggaran kegiatan, Sekretariat Dewan memiliki kurang lebih anggaran sebesar Rp133 milyar.
- b. Permasalahan yang kerap terjadi adalah sulitnya pencapaian target penyerapan anggaran hal tersebut karena banyaknya anggota dewan yang memiliki agenda kerja sendiri sehingga hal yang ditargetkan oleh Sekwan banyak yang tidak tercapai.
- c. Pengawasan di Sekretariat DPRD Kota Surabaya masih pada taraf pengawasan melekat (WASKAT).
- d. Sekretariat DPRD kota Surabaya, pengawasannya di lakukan oleh Inspektorat Kota Surabaya.

3. Pertemuan dengan Perwakilan BPKP Jawa Timur



Pertemuan dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 4 Agustus 2016, pukul 09.00 WIB dan diterima oleh Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur yaitu Bapak Agus Setianto, Informasi yang didapatkan pada pertemuan

tersebut, yaitu;

- a. Perwakilan BPKP Jawa Timur memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pengawasan yang dikelola oleh Inspektorat masing-masing.
- b. Secara umum Perwakilan BPKP Jawa Timur telah mengalami beberapa perubahan kerangka kerja dalam manajemen perubahan, salah satunya dalam reformasi birokrasi dengan area yang target perbaikannya adalah; Organisasi, Tata Laksana, Peraturan Perundangan, SDM Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik, Pola Pikir dan Budaya kerja Aparatur.



- c. Secara lingkup SDM Perwakilan BPKP Jawa Timur memiliki 241 auditor teknis, dengan 180 Orang teknis tersebar di 39 Kabupaten/Kota.
- d. Secara umum tugas perwakilan BPKP mencakup;
 - Pengawasan Intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral.
 - Pengawasan perbendaharaan umum negara.
 - Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari presiden dan atau atas permintaan kepala daerah.
 - Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada wilayah kerjanya.

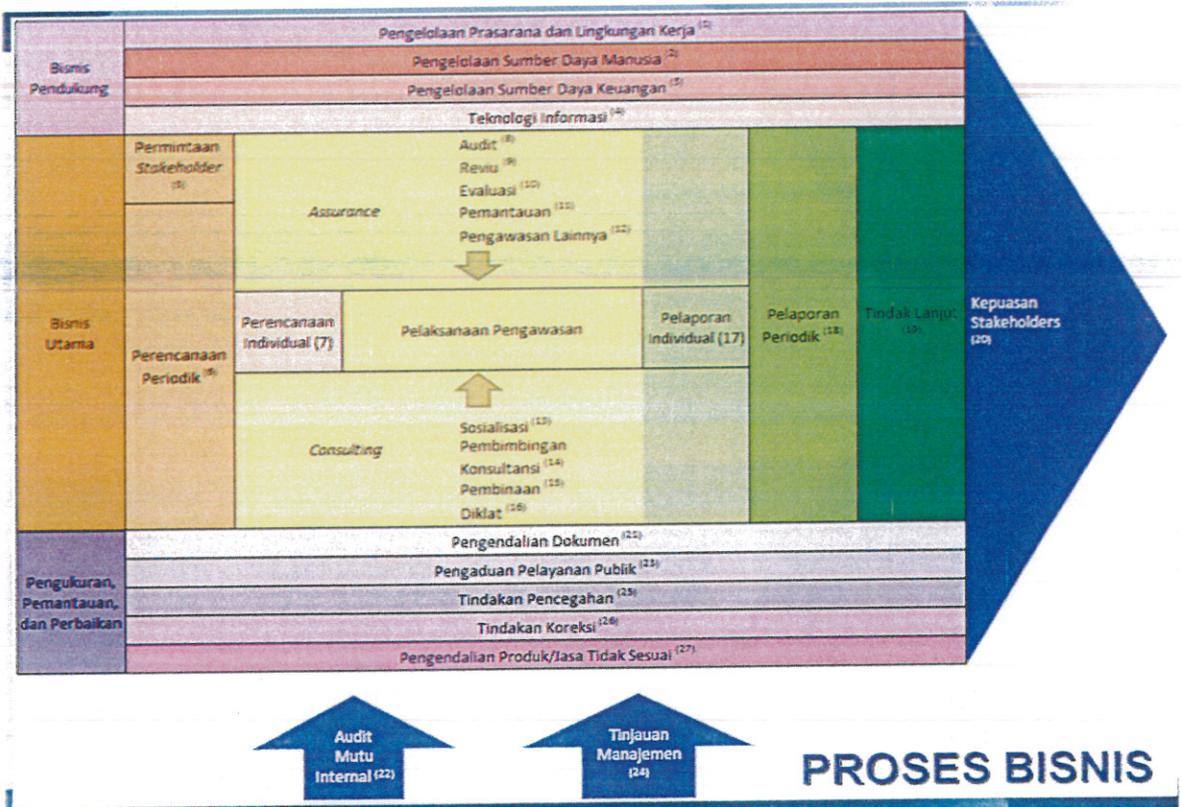
- Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan.

e. Proses penugasan berdasarkan dari Peta Resiko (rendah, sedang dan tinggi) dengan menggunakan teori KDKD yaitu kemungkinan terjadinya



tinggi dengan dampak signifikan.

f. Secara spesifik proses pekerjaan sudah dirancang berdasarkan permintaan stakeholder dan skala periodik sebagai berikut;



g. Adapun mitra kerja dari Perwakilan BPKP Jawa Timur mencakup;

- Bidang IPP : 51 Instansi Vertikal dan 6 PTN
- Bidang APD : 39 Pemda dan 39 APIP
- Bidang AN : 16 BUMN, 113 BUMD dan 63 RSD
- Bidang Investigasi : 39 Polda/Polres dan 39 Kejati dan Kejari

- h. Fokus pengawasan tahun 2016, meliputi
- Pengawasan program prioritas nasional
 - Peningkatan Ruang Fiskal Negara
 - Pengawasan alokasi keuangan daerah (dana transfer)
 - Peningkatan kapabilitas pengawasan intern dan sinergitas APIP
 - Sistem informasi manajemen aset (SIMDA)
 - Create siste keuangan desa
 - Pengamanan aset negara/daerah yang efektif
 - Peningkatan tata kelola
- i. Target kinerja tahun 2016 berdasarkan indikator kinerja pada perwakilan BPKP Jawa Timur, yaitu:
- j. Inovasi yang telah dilakukan oleh Perwakilan BPKP Jawa Timur, yaitu;
- Aplikasi Exis untuk pengendalian penugasan dan keuangan
 - ISO 90012008 dalam pengawasan keuangan dan pembangunan IPP/Pemda/BUMN dan BUMD
 - Maturity Level SPIP 3,31 (self assessment)
 - 69% Pemda yang WTP menggunakan SIMDA
- k. Dalam pengembangan kompetensi auditor maka dilakukan pengembangan dari internal dan eksternal, yaitu;
- Secara Internal:
 1. Melalui pendidikan dan pelatihan
 2. Program pelatihan mandiri
 - Secara Eksternal;
 1. Pendidikan dan pelatihan ; Formal, Tugas Belajar, ijin belajar dan sertifikasi
 2. Pengembangan Profesi ; Seminar dan Workshop
- l. Adapun kendala dalam pelaksanaan tugas APIP, yaitu;
1. Komitmen pemimpin yang masih kurang
 2. Kompetensi auditor yang masih kurang
 3. Jumlah auditor yang belum memadai
 4. Pola rekrutmen yang masih kurang
 5. Independensi yang terkadang masih lemah

TARGET KINERJA 2016-Menurut Indikator Kinerja



Demikianlah laporan hasil Benchmarking yang dilakukan oleh Tim Inspektorat II Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI ke Provinsi Jawa Timur, semoga dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pengetahuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengawasan di Lingkungan ITTAMA Sekretariat Jenderal DPR RI.

Inspektorat II

Ign. Bambang Rudy Anto, S.H., M.H.
NIP.19590314 1988031 001